

RASANAN

Gagal Lagi

DUA TAHUN berturut-turut calon jemaah haji Indonesia gagal berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah melalui Kementerian Agama kembali memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji pada musim haji 2021 Masehi/1442 Hijriah. Alasannya, sama dengan tahun sebelumnya. Karena pandemi Covid-19.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti DPR RI, organisasi keagamaan, asosiasi travel dan unsur lainnya. Alasan lain menyangkut gagalnya memberangkatkan haji, disebabkan pihak Arab Saudi tak juga kunjung membuka akses haji bagi jemaah luar negeri termasuk Indonesia.

Akibatnya, pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah. "Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Adalah benar. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Utuk diketahui, kuota dasar jemaah haji dari Indonesia hingga saat ini berada di kisaran angka 211.000 slot, yang terbagi atas 194.000 kuota reguler dan 17.000 kuota khusus. Artinya, dengan kegagalan pemberangkatan selama dua tahun ini, akan membuat jadwal tunggu calon jemaah haji Tanah Air menjadi semakin lama. Padahal awal tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah meminta Menteri Agama untuk secara aktif melobi Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian kuota haji 2021 untuk jemaah asal Indonesia.

Wapres berharap Pemerintah Indonesia mendapatkan kepastian apakah penyelenggaraan ibadah haji tetap diselenggarakan meski pandemi Covid-19 masih melanda. Akan tetapi keputusan sudah diambil. Pahit memang. Para calon jemaah haji tetap harus ikhlas menerima kenyataan tersebut. Toh ini hanya penundaan. Siapa tahu ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini.

Meskipun begitu, pemerintah harus melakukan introspeksi. Dua kali gagal memberangkatkan jemaah haji, bukanlah hal yang baik. Harus menjadi pelajaran, agar tahun-tahun berikutnya bisa mempersiapkan manajemen haji secara lebih baik. Jika perlu, pemerintah melibatkan orang-orang yang punya hubungan baik dengan Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan loby agar peristiwa ini tidak terulang. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, sudah benar. Akan tetapi jika dipersiapkan secara matang dan terencana, semuanya bisa diantisipasi dan para calon jemaah haji tidak merasa dirugikan. (*)

DI KABUPATEN WONOSOBO

Opini WTP Harus Dijadikan Cambuk

WAKIL Bupati (Wabup) Wonosobo, Muhammad Albar mendorong agar setiap perangkat daerah segera melaksanakan belanja daerah sesuai peruntukannya. Menurutnya, sejauh ini serapan anggaran belanja daerah dinilai masih rendah, sehingga harus dilakukan akselerasi guna mendorong setiap perangkat daerah segera melakukan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami melihat perkembangan kegiatan belanja daerah dilakukan oleh perangkat daerah masih sedikit. Untuk itu kami mendorong setiap perangkat daerah untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah," ungkap Muhammad Albar ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Belanja Langsung (POBL) di Ruang Mangoenkoesoemoe Setda Wonosobo, Senin (7/6).

Dalam kesempatan itu, Albar juga menyampaikan garis besar perkembangan kegiatan belanja yang telah dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten temanggung. Di antaranya, anggaran belanja tersedia Rp 1.967.746.230.449 dan hingga 30 April 2021 telah terealisasi Rp 265.672.713.309 atau 13,5 persen. Kemudian hingga 31 Mei 2021, realisasi belanja menjadi Rp 401.512.596.062 atau sebesar 20,4 persen. "Melihat serapan anggaran tersebut dapat terlihat bahwa dari April-Mei 2021 hanya terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar 6,9 persen," ungkapnya.

Sebagai evaluasi, Wabup Temanggung mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut yang sudah ditempuh oleh masing-masing perangkat daerah, terkait perintah yang sudah diberikan pada rapat koordinasi sebelumnya. Kepala Bagian Hukum dan Tim Penyusun Peraturan Bupati (Perbup)



Muhammad Albar

MP-Ariswanto

Penjabaran APBD Kabupaten setelah *refocusing* juga diminta melaporkan sejauh mana proses penyusunan naskah peraturan tersebut.

"Laporkan pula jika terdapat kendala yang dapat kita diskusikan bersama pemecahannya. Dengan demikian Perbup dapat segera terbit sesuai target, dan perangkat daerah dapat segera melaksanakan kegiatan," papar Muhammad Albar.

Wabup juga meminta kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaporkan sejauh mana *follow up* terhadap pemerintah provinsi terkait petunjuk dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), dan kapan RKO dapat mulai disusun. "Saya dan Bupati berharap pengadaan

barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik pada kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai prosedur, sesuai tenggat waktu yang ditargetkan," tandasnya.

Selain itu, Wabup juga meminta sejauh mana proses pelaporan kepada Kementerian Keuangan, serta input di aplikasi OMSPAN terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaporan maksimal dilakukan pada 21 Juli 2021. Jangan sampai alokasi DAK tidak dapat ditransfer ke Kas Daerah dan dianggap hangus karena keterlambatan pelaporan dan penginputan. "Jangan sampai karena keterlambatan yang tidak diinginkan ini, pelaksanaan kegiatan fisik dalam rangka

pelaksanaan DAK Fisik terhambat," tegasnya.

Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo juga menyampaikan kepada semua perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti arahan dari Wakil Bupati. "Meski dikejar waktu, saya yakin kepada semua perangkat daerah bisa melaksanakan. Tentu dengan berkoordinasi antar perangkat daerah dan pihak terkait, sehingga penyerapan anggaran bisa cepat terlaksana dengan baik tanpa menyalahi aturan yang ada," harapnya.

Meski demikian, kecermatan, kehati-hatian, dan upaya pencegahan penyimpangan anggaran tetap harus selalu ditekankan. "Hal itu seperti diungkapkan Bupati Temanggung Afif Nurhidayat, bahwa capaian prestasi WTP menjadi peringatan yang harus dijadikan cambuk dorongan semangat kerja ke depan, sehingga nantinya mampu mencapai prestasi yang benar-benar bersih," kata Sekda.

Disebutkan pula, Bupati selalu mengingatkan bahwa capaian WTP harus menjadi *warning*. Harus dijadikan cambuk, sehingga pembangunan Kabupaten Temanggung di masa mendatang betul-betul mampu mencapai tahapan WTP yang benar-benar *clean* dan bukan WTP dengan banyak catatan.

Bupati ingin capaian WTP menjadi pilar penting untuk dievaluasi, pilar penting untuk dilakukan peningkatan. Oleh sebab itu, inspektorat sebagai pengawas juga harus menyiapkan diri menjadi katalisator, fasilitator untuk menyampaikan kepada OPD, terkait dengan peringatan dini. Kalau ada sesuatu dan ada persoalan, inspektorat harus tau. Bupati Afif Nurhidayat selalu mengingatkan, setelah dilakukan peringatan dini terdapat temuan, harus segera dilakukan perbaikan dan dilakukan perubahan terhadap hal-hal yang berpotensi terjadinya penyimpangan. (Ariswanto)

MASA PANDEMI COVID-19 DI TEMANGGUNG

Tetap Gencar Sosialisasi Bahaya Narkoba

BADAN Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung dan Satres Narkoba Polres setempat tetap menggenjarkan sosialisasi bahaya narkoba untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Sosialisasi dilakukan

dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Kepala BNN Kabupaten Temanggung, AKBP Agung Prabowo mengatakan ada tren peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Temanggung sehingga perlu digencarkan

sosialisasi untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Sosialisasi dengan sasaran masyarakat umum dan pelajar. Saat sosialisasi juga diselipkan bahaya Covid-19, sehingga warga terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar pandemi Covid-19 segera

berakhir.

"Kami masuk di komunitas, pelajar, perusahaan dan berbagai instansi. Generasi muda harus dijauhkan dari narkoba sebab berbahaya. Fakta menunjukkan, narkoba merusak organ tubuh, otak, dan psikologi. Perekonomian juga hancur akibat narkoba," ungkap AKBP Agung di sela Pengembangan Kapasitas P4GN kepada insan media, Selasa (8/6).

Menurut Kasat Res Narkoba Polres Temanggung AKP Bambang Sulisty, pihaknya menargetkan lima kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan sasaran masyarakat umum terutama pelajar. "Kesulitan saat ini adalah sejumlah pihak ada yang belum terbuka untuk mengadakan kegiatan dengan alasan pandemi. Tetapi setelah mendapat penjelasan, akhirnya mereka terbuka," jelasnya.

Diakui, kegiatan sosialisasi bahaya narkoba untuk sementara pada komunitas atau instansi tertentu dengan pembatasan

peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. "Bahaya narkoba dan bahaya Covid-19 dipadukan, jangan sampai ada penularan penggunaan narkoba dan penularan Covid-19," tandas AKP Bambang.

Disebutkan, saat ini ada peningkatan kasus narkoba di Temanggung. sampai awal Juni, sudah ada 17 kasus yang ditangani, sehingga dimungkinkan sampai akhir tahun bisa bertambah. " Pada 2018 ada 19 kasus, tahun 2019 ada 21 kasus, dan pada tahun 2020 ada 27 kasus. Ini menunjukkan peningkatan kasus," tegasnya. Karena itu, Polres Temanggung bersama BNN Kabupaten dan menggandeng berbagai pihak terus melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

(Zaini Arrosyid)



Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di untuk kalangan jurnalis di Temanggung.

MP-Zaini Arrosyid

IKLAN BARIS

LES PRIVAT

Les Privat Biola, Piano, Gitar, dll. Bisa Datang ke Rumah (50-75k) Deokani Music (WA.085729894481)
3 / 00092/0621